

Pemulihan Citra Pemerintah dalam Insiden Besipae: Menakar Kualitas Peran *Government Public Relations*

Yohanes Museng Ola Buluamang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

ABSTRACT

The Besipae incident shaped the public image of the NTT Provincial Government. This study aimed to determine the frequency of news themes, news sources and descriptions of the government's response to the Besipae incident contained in the Pos Kupang daily. In addition, this study aims to test the hypothesis of the influence of news themes on news depictions. The research method used is quantitative media content analysis. The results of the analysis show that there are 12 themes of government confirmation news, 10 themes of government clarification news and 2 themes of government action news. In the news source variable, there are 21 echelon II official news sources and 1 echelon III official news source. Meanwhile, it is known that there are 14 positive depictions of news, 2 negative and 8 neutral depictions. The results of the hypothesis test shows that the theme of government clarification news has a significant effect on news depiction, while the two themes of confirmation news and government actions have no significant effect on news depiction. The results of media content analysis show that the role of public relations for provincial government of NTT in responding to the Besipae incident or conflict has a relatively small role.

Keywords: *Besipae Incident, Government Public Relations, and Government Image*

ABSTRAK

Insiden Besipae membentuk citra publik terhadap Pemerintah Provinsi NTT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi tema berita, sumber berita dan penggambaran berita mengenai respon pemerintah dalam menyikapi insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh tema berita terhadap penggambaran berita. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi media kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 12 tema berita konfirmasi pemerintah, 10 tema berita klarifikasi pemerintah dan 2 tema berita tindakan pemerintah. Pada variabel sumber berita, terdapat sumber berita pejabat eselon II sebanyak 21 kali dan pejabat eselon III sebanyak 1 kali. Sedangkan, variabel penggambaran berita diketahui terdapat 14 penggambaran yang positif, 2 negatif dan 8 netral. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tema berita klarifikasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita, sedangkan kedua tema berita konfirmasi dan tindakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita. Hasil analisis isi media menunjukkan bahwa peran *public relations* pemerintah provinsi NTT dalam merespon insiden atau konflik Besipae memiliki peran yang relatif masih kecil.

Kata Kunci: Insiden Besipae, *Public Relations* Pemerintah, dan Citra Pemerintah

A. PENDAHULUAN

Konflik Besipae merupakan salah satu problem sosial, budaya dan hukum yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2020. Selain pihak Pemerintah Provinsi NTT yang terlibat, konflik ini melibatkan juga masyarakat adat atau warga Besipae, Desa Pubabu, Kecamatan,

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Secara umum, konflik Besipae disebabkan oleh pemanfaatan atau alih fungsi lahan Besipae oleh Pemerintah Provinsi NTT. Menurut pemerintah provinsi NTT, status hukum kepemilikan tanah adalah milik pemerintah provinsi NTT. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat adat Besipae belum mengakui kejelasan status hukum tanah tersebut.

Alih fungsi atau pemanfaatan lahan Besipae ini mendapat reaksi penolakan dari warga Besipae karena status hukum tanah dan persoalan sosial budaya. Dalam pemahaman warga Besipae, kawasan Besipae merupakan hutan adat Pubabu yang merupakan bagian dari satu kesatuan masyarakat adat yang dihormati, dan dilindungi oleh masyarakat adat setempat. Hutan adat ini dimiliki oleh masyarakat adat di Desa Oe Ekam, Desa Mio, Desa Polo dan Desa Linamutu. Oleh masyarakat adat setempat, hutan Pubabu memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghubungkan mereka dengan wujud tertinggi, dan merepresentasikan jati diri mereka.

Dalam menghadapi sikap warga Besipae, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTT melalui tahapan persuasif dan negosiasi. Setiap pendekatan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berbeda. Di satu sisi warga Besipae menerima keputusan pemerintah, sedangkan di sisi lain sebagian masyarakat menolak keputusan pemerintah. Rangkaian peristiwa yang terjadi berujung pada tindakan represif aparat terhadap ibu-ibu.

Publikasi insiden Besipae memunculkan pro dan kontra di tengah publik terkait pendekatan Pemerintah Provinsi NTT dalam penyelesaian konflik ini. Ada pihak yang menentang keras pendekatan pemerintah yang koersif dan represif. Pemberitaan media yang mem-*blow up* tindakan represif semakin mendiskreditkan posisi pemerintah. Pemerintah dinilai mengabaikan penegakkan HAM dalam upaya penyelesaian konflik Besipae.

Positioning pemerintah yang kurang diuntungkan dalam publikasi media disikapi secara responsif melalui peran *public relations*. Potensi kesan atau citra negatif pemerintah diminimalisir melalui komunikasi publik ke media massa. Kaitan dengan ini, peran PR pemerintah yang berhubungan dengan media (media relations) dioptimalkan untuk memulihkan terbentuknya citra negatif di publik. PR pemerintah berperan untuk memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah, dan mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat (Cutlip, *et, al.*, 2010). Setiap kebijakan pemerintah dengan sendirinya memiliki relasi alamiah dengan PR. Sikap tidak memperdulikan proses komunikasi ataupun pembuatan strategi PR akan menyebabkan program atau setiap pendekatan menjadi kontraproduktif (Wasesa & Macnamara, 2010).

Uraian singkat ini mengerucut pada tiga kesimpulan problem riset ini. *Pertama*, problem empirik. Problem empirik yang dirumuskan dalam riset ini adalah Konflik Besipae mengarah pada potensi terbentuknya citra negatif. *Kedua*, Kedua problem normatif. Problem normatif yang dirumuskan dalam riset ini adalah kualitas peran *public relations* dalam menyikapi konflik Besipae belum menunjukkan adanya pemulihan citra Pemerintah Provinsi NTT. *Ketiga*, problem teoritis. Posisi *public relations* yang memiliki keunggulan manajerial dalam institusi belum optimal menunjukkan perannya. Berdasarkan ketiga problem riset ini, ada dua batasan riset yang dirumuskan yakni frekuensi tema berita, sumber berita dan penggambaran berita mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang dan pengaruh tema berita terhadap penggambaran berita mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang.

Pendekatan terhadap ketiga problem ini ditempuh dengan pelaksanaan riset PR. Secara teoritis, riset *public relations* menyediakan fondasi bagi apapun yang ingin dilakukan seorang

komunikator, termasuk di dalamnya mengidentifikasi dan memahami kelompok publik yang dijadikan target utama, menggarap isu-isu penting, mengembangkan strategi organisasional. Singkatnya, *public relations* pemerintah berperan dalam menyediakan hasil riset yang objektif untuk kepentingan organisasi dalam merespon dan memonitoring perkembangan organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi (Ardianto, 2010).

Kerangka Teori *Public Relations*

Kerangka teori dalam penelitian ini merujuk pada dua teori *public relations*, yakni teori teori citra (*image theory*) dan teori pemulihan citra (*image restoration theory*). Teori citra menjelaskan terdapat tujuh variabel penting dalam proses pembentukan citra yang muncul pada diri seseorang, di antaranya; stimulus, persepsi, kognisi, motivasi, sikap, tindakan dan respons atau tingkah laku. Ketujuh variabel ini memiliki peran masing-masing dalam pembentukan serangkaian pengetahuan, pengalaman, perasaan (emosi) dan penilaian yang diorganisasikan dalam sistem kognisi manusia, atau pengetahuan pribadi yang diyakini kebenarannya. Sedangkan, teori pemulihan citra digunakan sebagai acuan dalam menjawab krisis reputasi dan citra organisasi atau seseorang. Penjelasan teori ini menekankan betapa pentingnya kemampuan komunikasi seseorang secara efektif dalam menghadapi adanya ancaman citra dari pihak eksternal. Untuk menjelaskan kepada publik, ada dua aspek yang harus diputuskan yakni; apakah tuduhan atau kecurigaan itu dinilai sebagai ancaman citra; dan siapa khalayak yang paling penting (Ardianto, 2010).

Tinjauan Riset-Riset Sebelumnya

Salah satu riset yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini adalah Citra Pemerintah Indonesia di Acara Pembukaan Asian Games 2018 (Analisis Isi Kuantitatif Pada Situs Berita Online Tribunnews.Com, DetikCom dan Liputan6.Com. hasil penelitian menemukan bahwa citra pemerintah yang terbentuk didominasi oleh citra politik bila dibandingkan dengan citra birokrasi. Selain itu, hasil riset menunjukkan bahwa media cenderung mencitrakan presiden sebagai citra politik daripada citra birokrasi yang melibatkan partai politik di dalamnya (Cecilia, *et., al.*, 2020).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif terhadap publikasi media Pos Kupang seputar respon Pemerintah Provinsi NTT dalam menyikapi insiden atau konflik Besipae. Analisis isi kuantitatif terhadap unit analisis memperhatikan kategori penelitian di bawah ini:

Tabel 1. Kategori Penelitian

Variabel	Kategori	Definisi Kategori
Tema Berita	Klarifikasi Pemerintah	Isi berita yang memuat tanggapan pemerintah berupa penjelasan dan penjernihan terhadap konflik atau insiden Besipae
	Konfirmasi Pemerintah	Isi berita yang memuat tanggapan pemerintah berupa penegasan, atau membenaran terhadap konflik atau insiden Besipae
	Tindakan Pemerintah	Isi berita yang memuat langkah konkrit pemerintah dalam penyelesaian konflik atau insiden Besipae
Sumber Berita	Sekretaris Daerah	Isi berita yang memuat penyampaian tanggapan pemerintah oleh sekretaris daerah terkait insiden atau konflik Besipae
	Pejabat Eselon II	Isi berita yang memuat penyampaian tanggapan pemerintah oleh pejabat eselon II terkait insiden atau konflik Besipae

	Pejabat Eselon III	Isi berita yang memuat penyampaian tanggapan pemerintah oleh pejabat eselon III terkait insiden atau konflik Besipae
Penggambanran Berita	Positif	Isi berita yang menggambarkan pemerintah secara baik, yang dilihat dari adanya dukungan atau pembelaan terkait insiden atau konflik Besipae
	Netral	Isi berita yang menggambarkan pemerintah secara berimbang, yang dilihat dari tidak adanya dukungan, pembelaan, kritik dan penolakan terkait insiden atau konflik Besipae
	Negatif	Isi berita yang menggambarkan pemerintah secara buruk, yang dilihat dari adanya kritikan atau penolakan terkait insiden atau konflik Besipae

Sumber: Diolah, 2021

Unit analisis yang ditentukan dalam penelitian ini adalah kutipan pernyataan dari Pemerintah Provinsi NTT yang terdapat dalam teks berita media Pos Kupang selama periode Agustus-Desember 2020. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa teks berita. Instrumen penelitian menggunakan lembar koding atau *coding sheet*. Untuk mengetahui kuantitas tema berita, sumber berita dan penggambaran berita, analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi. Sedangkan, untuk pengaruh antara tema berita dengan penggambaran berita, digunakan analisis statistik regresi linear dengan menggunakan *software* SPSS 20.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran terhadap berita Pos Kupang selama periode Agustus-Desember 2020 ditemukan bahwa terdapat 54 berita yang mempublikasi tentang insiden atau konflik Besipae. dari 54 berita tersebut, ditemukan ada 21 berita yang menampilkan pernyataan sikap dari Pemerintah Provinsi NTT.

Tabel 2. Data Teks Berita

No	Tanggal	Judul Berita
1	17/8/2020	WALHI kecam tindakan represif Pemprov NTT di pubabu TTS, Umbu Wulang: Seharusnya Dialog
2	19/8/2020	Ety Selan Menangis Histeris Ketakutan, Brimob di Besipae Tembakan Peluru Gas
3	19/8/2020	Partai Golkar NTT minta pemerintah hentikan tindakan intimidatif di Besipae
4	22/8/2020	Pemerintah NTT Imbau Provokasi Konflik Besipae Dihentikan
5	22/8/2020	Sony Libing Bilang Pemda NTT Segera Perluas Dialog Tangani Konflik Lahan di Besipae
6	22/8/2020	Rumah Relokasi Pemprov NTT Dinilai Tak Layak, Sony: Akan Kita Benahi
7	22/8/2020	Pemerintah Sediakan Lahan Jadi Hak Milik Bagi 37 KK di Besipae
8	22/8/2020	Sebagian Warga Pubabu Tolak Surat Kesepakatan Pemprov NTT
9	22/8/2020	Sengketa Lahan Bsepae, TTS Berakhir, Para Usif Sepakat Mendukung Pemprov NTT
10	23/8/2020	Dandim Koerniawan, Tokoh Di balik Kesepakatan Pemprov NTT dan Warga Besipae
11	23/8/2020	Gustaf Nabuasa: Saya Akan Ganti, Yang Penting Kita Akhiri
12	23/8/2020	Pertemuan Pemprov NTT dan Keluarga Nabuasa, Inisiatif Dandim Koerniawan
13	24/8/2020	Komnas HAM Kunjungi Pubabu Besipae
14	25/8/2020	Lahan Pertanian Warga di Hutan Besipae Dipisahkan Jadi Hak Milik, Sony: Ada Pemecahan Sertifikat
15	29/8/2020	Sony: Pemprov NTT Apresiasi Kehadiran Komnas HAM di Besipae
16	31/8/2020	Besipae TTS Akan Dijadikan Sentra Produksi Porang
17	2/9/2020	Komnas HAM ke TTS Kumpulkan Bukti-Bukti Konflik di Lahan Besipae
18	24/9/2020	Masyarakat Adat Tolak Rencana Kunjungan Gubernur NTT ke Besipae

19	15/10/2020	Pubabu Besipae Memanas, Pemprov NTT Jangan Gunakan Anak dan Perempuan Untuk Provokasi
20	8/11/2020	Dinas Sosial NTT Serahkan Bantuan Sembako untuk 19 KK Besipae
21	16/10/2020	WALHI NTT Sebut Ada Darurat Kemanusiaan di Pubabu Besipae

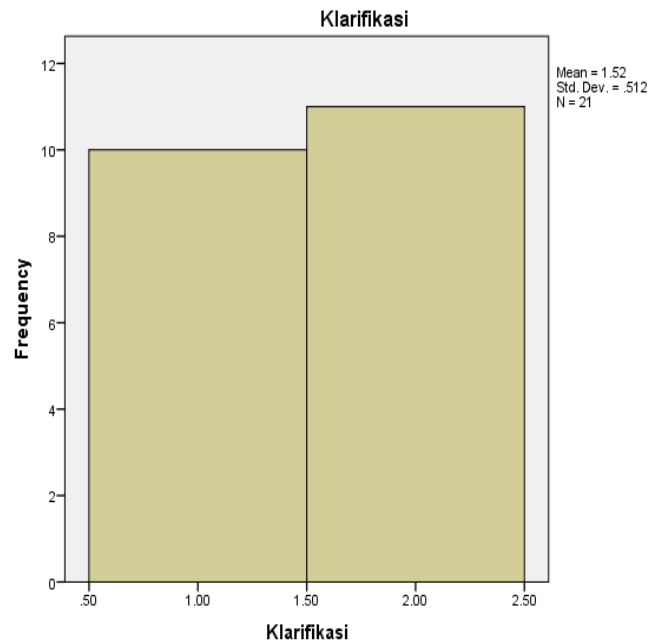
Sumber: Diolah, 2021.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, dilakukan analisis isi terhadap unit analisis yang ditentukan dengan memperhatikan pada kategori penelitian di bawah ini.

1. Analisis Distribusi Frekuensi

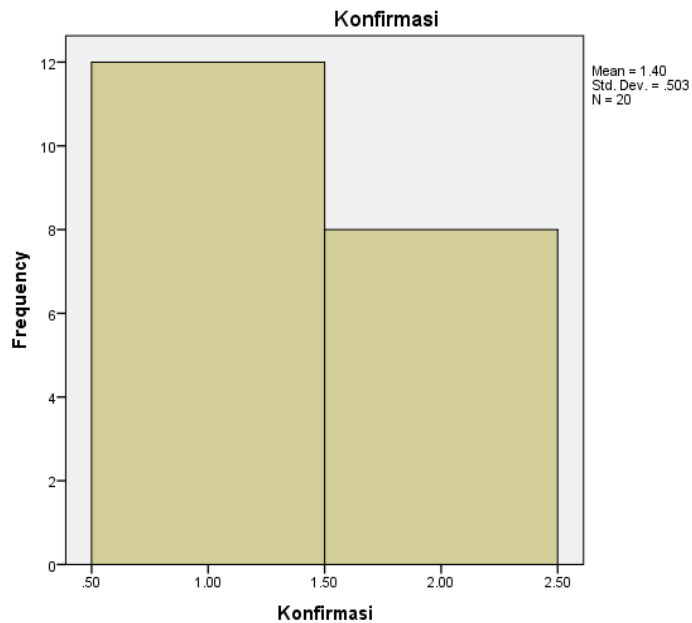
a. Tema berita

Ada tiga tema berita yang terdapat dalam 21 berita Pos Kupang terkait respon atau tanggapan pemerintah terhadap terjadinya insiden atau konflik Besipae. Tema berita pertama adalah klarifikasi pemerintah. Hasil analisis isi media menunjukkan bahwa terdapat 10 tema berita klarifikasi pemerintah (47.6%) dalam menyikapi insiden atau konflik Besipae.



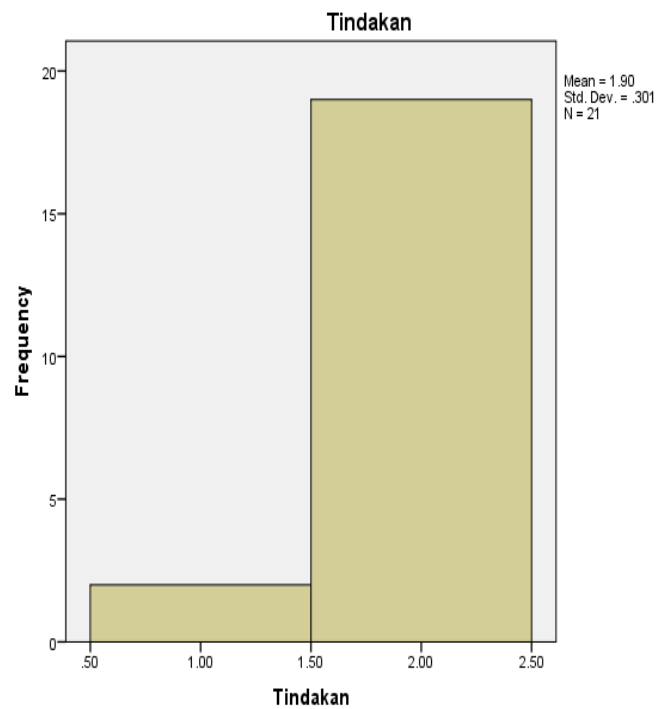
Gambar 1. Grafik Tema Berita Klarifikasi Pemerintah

Sedangkan, dari 21 teks berita terdapat 12 tema berita konfirmasi pemerintah (57,1%) dalam menyikapi insiden atau konflik Besipae.



Gambar 2. Grafik Tema Berita Konfirmasi Pemerintah

Pada tema berita tindakan pemerintah dalam menyikapi insiden atau konflik Besipae, dari 21 teks berita terdapat 2 tema berita tindakan pemerintah (9,2%).

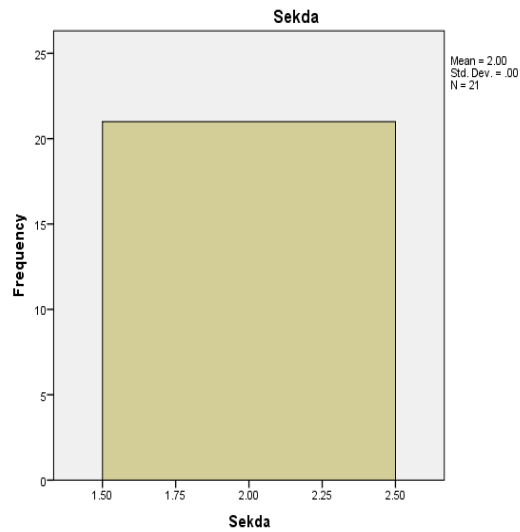


Gambar 3. Grafik Tema Berita Tindakan Pemerintah

b. Siapa atau Subjek atau Sumber Klarifikasi

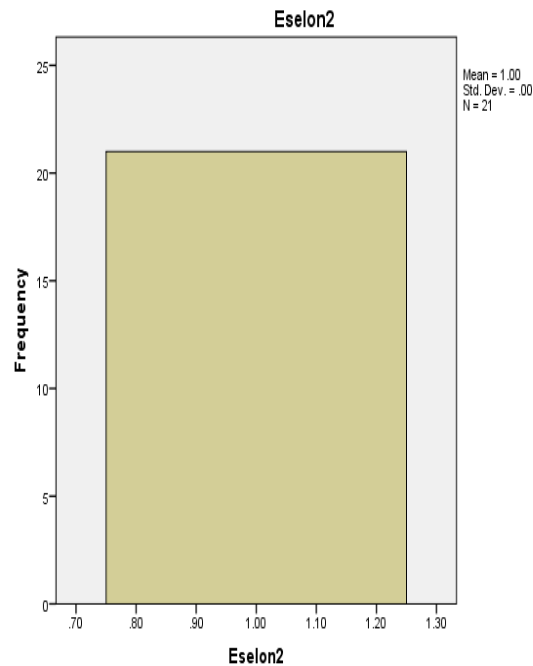
Hasil analisis isi menunjukkan bahwa terdapat tiga sumber berita mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang, antara lain; sekretaris daerah provinsi NTT, pejabat eselon II provinsi NTT dan pejabat eselon III provinsi NTT.

Dari hasil analisis isi, ditemukan bahwa tidak terdapat sumber berita dari Sekretaris Daerah mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang.



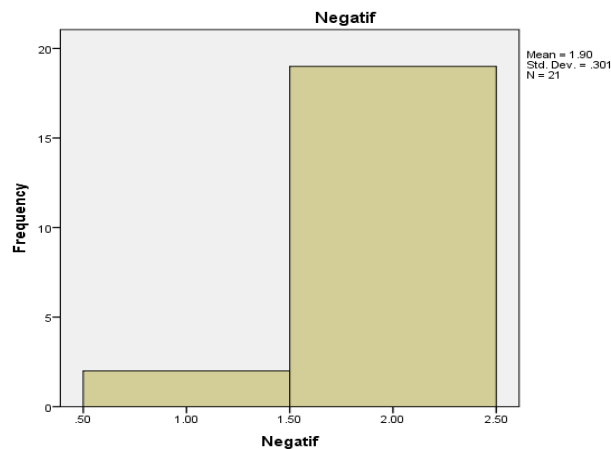
Gambar 4. Grafik Sumber Berita Sekretaris Daerah Provinsi NTT

Dari hasil analisis isi, ditemukan bahwa terdapat sumber berita dari Pejabat Eselon II sebanyak 21 (100%) mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang.



Gambar 5. Grafik Sumber Berita Pejabat Eselon II Provinsi NTT

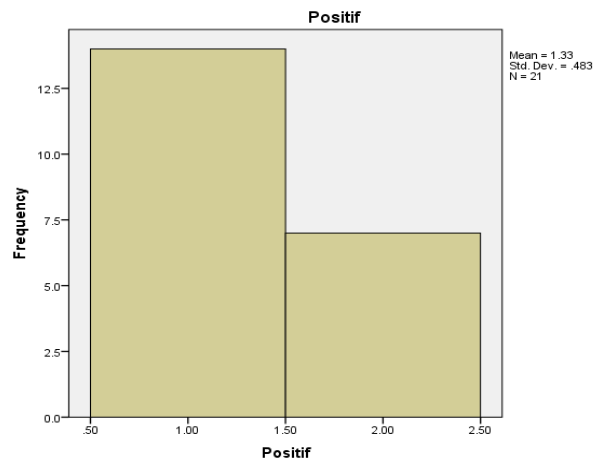
Dari hasil analisis isi, ditemukan bahwa terdapat sumber berita dari Pejabat Eselon III sebanyak 1 kali (4,8%) mengenai respon pemerintah dalam menyikapi konflik atau insiden Besipae yang terdapat dalam harian Pos Kupang.



Gambar 6. Grafik Sumber Berita Pejabat Eselon III Provinsi NTT

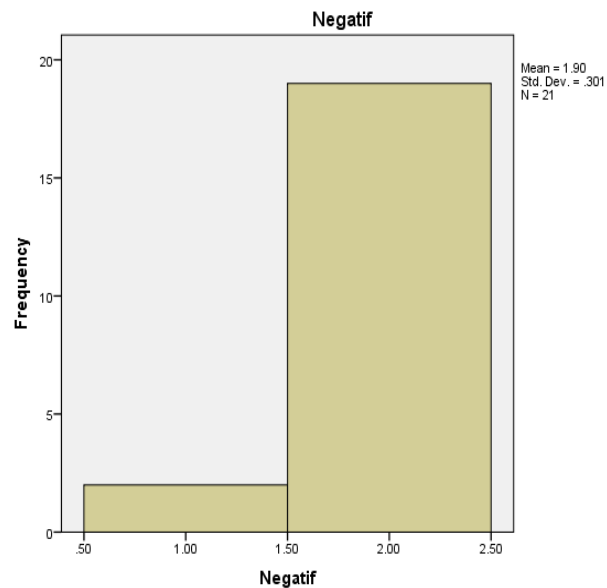
c. Penggambaran Pemerintah

Pada variabel penggambaran berita, terdapat tiga kategori utama yakni penggambaran berita secara positif, negatif dan netral. Dari hasil analisis isi media, terdapat 14 respon pemerintah yang digambarkan secara positif (66,7%).



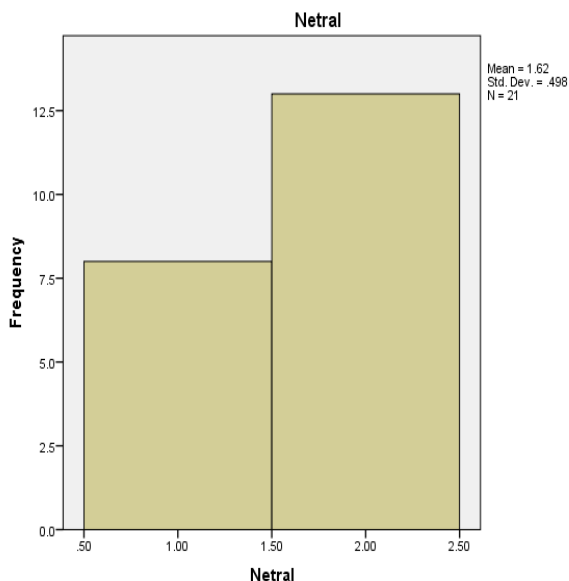
Gambar 7. Grafik Penggambaran Berita Secara Positif

Hasil analisis isi media menunjukkan bahwa terdapat 2 (9,5%) respon pemerintah yang digambarkan secara negatif.



Gambar 8. Grafik Penggambaran Berita Secara Negatif

Sedangkan, respon pemerintah yang digambarkan secara netral dalam merespon insiden atau konflik Besipae sebanyak 8 kali (38,1%).



Gambar 9. Grafik Penggambaran Berita Secara Netral

2. Analisis Regresi Linear

Hasil penelitian menggunakan perhitungan regresi linier. Dari hasil perhitungan terhadap data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Statistik

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625 ^a	.391	.284	.79875

a. Predictors: (Constant), Tindakan, Klarifikasi, Konfirmasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.963	3	2.321	3.638	.034 ^b
	Residual	10.846	17	.638		
	Total	17.810	20			

a. Dependent Variable: Penggberita

b. Predictors: (Constant), Tindakan, Klarifikasi, Konfirmasi

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.077	2.504		1.229	.236
	Klarifikasi	.615	.543	.334	1.134	.273
	Konfirmasi	-.654	.591	-.351	-1.107	.284
	Tindakan	-.692	.696	-.221	-.995	.334

a. Dependent Variable: Penggberita

Uji Kesesuaian Model

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R^2 (*R Square*) sebesar 0,391 atau (39,1%). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya nilai pengaruh variabel independen tema berita (klarifikasi, konfirmasi dan tindakan pemerintah) terhadap variabel dependen (penggambaran berita) sebesar 39,1%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tema berita (klarifikasi, konfirmasi dan tindakan pemerintah) dapat menjelaskan besarnya pengaruh sebesar 39,1% terhadap variasi variabel dependen (citra publik). Sedangkan sisanya sebesar 60,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. *Adjusted R Square* adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari *R Square* dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinasi. *Standard error of the estimate* adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 0.79875. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi jawaban responden sebesar 0.79875.

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode pengujian hipotesis yang dilakukan dengan membandingkan p-value dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Pengambilan keputusan dengan membandingkan p-value berdasarkan jika $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan jika $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 gagal ditolak (diterima). Adapun hasil analisis regresi linier pada pengolahan data dirangkum pada tabel hasil pengujian berikut ini:

Tabel 1.4. Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Coefficient	p-value	Simpulan
H_0	Tema berita klarifikasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita	0,334	>0,05	Diterima H_1
H_1	Tema berita klarifikasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita			
H_0	Tema berita konfirmasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita	-0,351	<0,05	Ditolak H_2
H_2	Tema berita konfirmasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita			
H_0	Tema berita tindakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita	-0,221	<0,05	Ditolak H_3
H_3	Tema berita tindakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita			

Sumber: Data Primer (Data Diolah SPSS.22)

Keterangan: ***significant 1% **significant 5% *significant 10%

Menakar Kualitas Peran PR Pemerintah dalam Pemulihan Citra

Dari hasil analisis isi media diketahui bahwa peran *public relations* pemerintah provinsi NTT relatif kecil. Hal ini ditunjukkan dengan kuantitas publikasi media Pos Kupang mengenai respon pemerintah terhadap insiden Besipae selama periode Agustus-Desember 2020 hanya terdapat pada 21 berita dari total 55 berita. Selanjutnya, dalam 22 berita tersebut, respon pemerintah provinsi NTT terhadap insiden Besipae didominasi oleh konfirmasi pemerintah yang berjumlah 12 kali, sedangkan klarifikasi pemerintah berjumlah 10 kali dan tindakan pemerintah berjumlah 2 kali. Ini menunjukkan bahwa kuantitas pemulihan citra pemerintah belum menunjukkan kontribusi yang besar terhadap pemulihan citra secara keseluruhan karena dari keseluruhan berita tersebut, hanya dua berita yang menampilkan inisiatif pemerintah (konferensi pers atau dalam bentuk press release) dalam merespon insiden Besipae yang terjadi.

Selain itu, dari sumber berita tanggapan pemerintah, hasil analisis isi menunjukkan bahwa sumber berita yang dipilih media Pos Kupang lebih didominasi oleh pejabat pimpinan pratama atau pejabat eselon II, yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Sedangkan, pejabat pimpinan pratama atau eselon II yang membidangi tugas *public relations* sebatas dua kali menjadi sumber berita dalam merespon insiden atau konflik Besipae yang terjadi. Ini menunjukkan masih rendahnya peran *public relations* Pemerintah Provinsi NTT dalam menyikapi suatu insiden yang berkaitan dengan pemulihan citra pemerintah. Hal ini terlihat juga pada tema berita yang didominasi pada konfirmasi pemerintah. Padahal, peran *public relations* pemerintah lebih ditekankan pada tingginya tema berita klarifikasi dan tindakan pemerintah. Tingginya kuantitas tema berita yang memuat klarifikasi dan tindakan pemerintah berpotensi terhadap pemulihan citra. Hal ini ditunjukkan dengan analisis regresi linear yang menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara tema berita konfirmasi dan tindakan pemerintah dengan penggambaran berita.

Pada variabel penggambaran berita, hasil analisis isi media menunjukkan bahwa ketiga tema berita yang disampaikan oleh pejabat eselon II dan III Pemerintah Provinsi NTT memuat 14 kali pelabelan atau penggambaran yang positif. Meskipun terdapat dua kali pelabelan atau penggambaran yang negatif, dan delapan kali penggambaran yang netral namun *content* tema berita tersebut merupakan konfirmasi terhadap kebenaran realitas yang terjadi. Penggambaran berita yang positif turut membantu pemulihan citra pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan riset citra publik berdasarkan kuantitas pemberitaan.

D. PENUTUP

Simpulan

Insiden Besipae yang terjadi melibatkan pihak Pemerintah Provinsi NTT dan warga Besipae. Di satu sisi insiden Besipae turut mempengaruhi pandangan publik terhadap Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT berkewajiban menyikapi terjadinya insiden Besipae dan pandangan publik yang terbentuk. Realitas ini mendapat atensi harian Pos Kupang dalam pemberitaannya.

Hasil penelusuran terhadap publikasi harian Pos Kupang selama periode Agustus-Desember 2020 ditemukan sebanyak 54 berita yang memuat insiden atau konflik Besipae. Dari 54 berita tersebut, terdapat 21 berita yang memuat respon Pemerintah Provinsi NTT dalam menyikapi insiden atau konflik Besipae. Dengan menggunakan analisis isi media, hasil perhitungan statistik deskriptif, menunjukkan bahwa terdapat 12 tema berita konfirmasi pemerintah, 10 tema berita

klarifikasi pemerintah dan 2 tema berita tindakan pemerintah. Pada variabel sumber berita, terdapat sumber berita pejabat eselon II sebanyak 21 kali dan pejabat eselon III sebanyak 1 kali. Sedangkan, variabel penggambaran berita diketahui terdapat 14 penggambaran yang positif, 2 negatif dan 8 netral.

Dari hasil analisis regresi linier diketahui bahwa besarnya nilai pengaruh variabel independen tema berita (klarifikasi, konfirmasi dan tindakan pemerintah) terhadap variabel dependen (penggambaran berita) sebesar 39,1%. Hasil uji hipotesis terhadap pengaruh tema berita terhadap penggambaran berita menunjukkan bahwa tema berita klarifikasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita, sedangkan kedua tema berita konfirmasi dan tindakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penggambaran berita. Dalam kaitannya dengan peran *public relation*, hasil analisis isi media di atas menunjukkan bahwa peran *public relations* pemerintah provinsi NTT dalam merespon insiden atau konflik Besipae memiliki peran yang relatif masih kecil.

Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam riset ini adalah perlu adanya peningkatan peran *public relations* pemerintah provinsi NTT dalam memulihkan citra pemerintah provinsi NTT. pemulihan citra pemerintah provinsi NTT dengan adanya insiden atau konflik Besipae dilakukan dengan peningkatan kuantitas tema berita klarifikasi dan tindakan pemerintah. Selain itu, peran pejabat eselon II yang membidangi *public relations* perlu ditingkatkan dalam *media relations* dengan memposisikan diri sebagai sumber berita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, E. (2010). *Metode Penelitian untuk Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wasesa, Silih Agung, dan Jim Macnamara. (2010). *Strategi Public Relations*. Jakarta: Gramedia.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center dan Glenn M. Broom. (2010). *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana.
- Cecilia, Stephania, Rino F. Boer, dan Casey Catherina. (2020). "Citra Pemerintah Indonesia di Acara Pembukaan Asian Games 2018". *Jurnal Komunikasi*, 11, (1), hal. 31-36.